

## PEREMPUAN DALAM ARUS POLITIK LOKAL: STUDI ELEKTORAL KETERPILIHAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI JAMBI

Alva Beriansyah<sup>1\*</sup> Hatta Abdi Muhammad<sup>2</sup>, Cholillah Suci Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Jambi. Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Jambi. Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Jambi. Indonesia

\*Korespondensi: [alvaberiansyah@unja.ac.id](mailto:alvaberiansyah@unja.ac.id)

### ABSTRACT

*This research examines the problems and electoral challenges of electing women from Jambi Province at the Central and Provincial Legislative Levels, which are still not representative of women. By using descriptive qualitative methods and combining the strengths of primary and secondary data. The findings in this study show that kinship with local political elites is one of the main political assets and strategies in contesting the 2019 Legislative Elections. The electability of existing women is still represented by women who utilize elements of family kinship with local political elites. Elected legislators who have political ties with local figures, such as local officials in the electoral district concerned, wives of local officials, children of local officials have an impact on the election of female legislators. This is because these local figures are well known by the wider community so that these figures will easily introduce their other relatives to participate in occupying other political positions. In fact, people who have loyalty to political figures who have been elected can immediately put their trust in new figures introduced by these political officials.*

**Keywords:** *Women's Election; Jambi Province; Familial Ties*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang problematika dan tantangan elektoral keterpilihan perempuan dari Provinsi Jambi pada Tingkat Pusat maupun Legislatif Provinsi yang mana masih belum representatif perempuan. Metode yang digunakan yakni Kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dengan elit politik lokal menjadi salah satu modal politik yang utama dan strategi dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019. keterpilihan perempuan yang ada masih terwakili oleh perempuan yang memanfaatkan unsur-unsur kekerabatan keluarga dengan elit politik lokal. Legislator terpilih yang memiliki kekerabatan politik dengan figur lokal, seperti pejabat lokal di dapil yang bersangkutan, istri pejabat lokal, anak pejabat lokal berimbas pada keterpilihan anggota legislatif perempuan. Hal ini dikarenakan figur-figur lokal tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sehingga figur tersebut akan dengan mudah memperkenalkan kerabatnya yang lain untuk turut serta menduduki kursi jabatan politik lainnya. Bahkan, masyarakat yang memiliki loyalitas terhadap figur politik yang telah terpilih dapat langsung menaruh trust kepada figur baru yang diperkenalkan oleh pejabat politik tersebut.

**Kata Kunci:** Keterpilihan Perempuan, Provinsi Jambi, Familial Ties

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi,

mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara termasuk dalam hal politik. Hak-hak politik yang dimaksud mencakup hak untuk berpartisipasi dalam memilih ataupun dalam mencalonkan diri pada proses tahapan pemilu baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Hal ini Sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin (Nimrah S dan Sakaria, 2014). Amanat konstitusi ini kemudian diturunkan kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang mewajibkan menyertakan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik, mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah serta setiap partai politik untuk memasukan 30% perempuan dalam kepengurusan. Dengan hadirnya aturan-aturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan keterpilihan perempuan dalam politik.

Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari berbagai aktivitas di bidang politik dalam hal ini sebagai anggota

parlemen misalnya, dimana para perempuan melibatkan diri secara aktif terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan.

Sebagaimana Ann Philips dalam Soetjipto (2011: 89), mengemukakan bahwa partisipasi politik bagi kaum perempuan bukan hanya terkait dengan adu ide atau gagasan tetapi lebih dari sekedar itu dan memiliki makna tersendiri. Ketika berbicara tentang partisipasi politik di pahami sebagai keterlibatan actor politik dalam pengambilan kebijakan peran perempuan penting untuk didiskusikan. Hal ini dikarenakan bukan hanya sekedar berkaitan tentang perwakilan kelompok tertentu akan tetapi lebih dari itu terkait dengan konsep keterwakilan itu sendiri yang berkaitan dengan masalah responsipitas dan juga akuntabilitas (Ani Soetjipto, 2011:98).

Keterwakilan perempuan dalam bidang politik termasuk Lembaga legislatif secara kualitas dan secara kuantitas merupakan suatu yang harus agar dapat terciptanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan agar dapat Bersama-sama ikut berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan (Subekti V.S, 2008: 54).

Pentingnya representasi perempuan ternyata tidak didukung oleh jumlah keterwakilan perempuan itu sendiri, baik dalam birokrasi pemerintahan ataupun dalam jabatan politik. Keterwakilan perempuan dalam politik, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif selalu menempati posisi minoritas daripada jumlah laki-laki. Perempuan merupakan sumber daya manusia yang jumlahnya cukup besar di Indonesia, sehingga perempuan memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan obyek pembangunan dari bangsa ini. Disinilah perempuan memiliki peran yang strategis untuk berpartisipasi dan ikut serta berperan dalam berbagai bidang seperti, bidang pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan lain. Namun jumlah perempuan yang besar ini tidak dapat terwakili dan tercerminkan secara faktual di lembaga-lembaga pembuat/pengambil keputusan politik di Indonesia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang politik.

Pada saat yang sama, keterwakilan perempuan di parlemen perlu terus ditingkatkan agar perempuan lebih terwakili secara setara dalam pelaksanaan kebijakan publik yang lebih baik dan lebih adil, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang lebih terarah. Hasil Pemilu 2019 di

tingkat DPR RI mewakili Provinsi Jambi, pemilihan perempuan kembali menjadi perbincangan. Dari delapan kursi DPR RI, wakil dari provinsi Jambi hanya meloloskan satu wakil perempuan, yaitu Saniatul Lativa, yang merupakan satu-satunya perempuan Jambi yang mendapatkan keterwakilan di DPR RI. Di tingkat provinsi, hasil pemilu legislatif 2019, keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi yang memberikan ruang minimal 30 persen tidak terwujud. Informasi jumlah anggota DPRD terpilih di Provinsi Jambi menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel I:**  
**Perbandingan Jenis Kelamin di DPRD**  
**Provinsi Jambi dari tahun 2004-2019**

Periode	Lk	Pr	Jumlah
2004-2009	39	6	45
2009-2014	35	10	45
2014-2019	48	7	55
2019-2024	47	8	55

*Sumber : Puskapol UI*

Hasil Pemilu 2019 untuk masa jabatan 2019-2024 dari 55 kursi DPRD Provinsi Jambi, hanya 8 kursi yang diisi oleh kaum perempuan dan 47 diisi oleh laki-laki. Untuk melihat siapa saja kaum perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Perempuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel II:**  
**Data Anggota DPRD Perempuan di**  
**DPRD Provinsi Jambi**

No	Nama	Dapil	Fraksi
1	Ririn Novianty. SE	Jambi II - Kab. Batanghari dan Kab. Muaro Jambi	Partai Amanat Nasional (PAN)
2	Nur Tri Kadarini, SE., M.Si., Ak	Jambi II- Kab. Batanghari dan Kab. Muaro Jambi	Fraksi PDI
3	Dra. HJ. Maimaznah	Jambi I-Kota Jambi	Fraksi Partai Golkar.
4	HJ. Yuli Yulianti, S,E., M.M	Jambi I-Kota Jambi	Fraksi Partai Demokrat.
5	Ezzaty, S.Psi (Anak AJB)	Jambi IV Kab Kerinci dan Kab Sungai Penuh	Fraksi Partai Demokrat
6	HJ. Nurhayati	Jambi VI Kab Tanjab Bar dan Tanjab Tim	Fraksi Partai Demokrat
7	HJ Eka Marlina, SE. MH	Jambi V Kab Bungo dan Kab Tebo	Fraksi partai PKB
8	HJ. Rahima, SH (Istri Pahrori)	Jambi V Kab Bungo dan Kab Tebo	Fraksi Nasdem Hanura

*Sumber: (Puskapol.ui.ac.id, 2020)*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada ketimpangan jumlah anggota legislatif perempuan dengan jumlah anggota legislatif perempuan dengan jumlah anggota legislatif laki-laki yang terpilih. Idealnya minimal 30% jumlah perwakilan dari kaum perempuan yang seharusnya, tetapi hanya diisi 14, 5 % saja.

Keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik tentu harus diikuti oleh modal politik yang kuat agar dapat terpilih seperti modal sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, salah satu modal politik yang dapat dimanfaatkan oleh calon anggota legislative perempuan untuk menangulung suara adalah dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan elit lokal. Hal ini dikarenakan figur-figur lokal tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sehingga figur tersebut akan dengan mudah memperkenalkan kerabatnya yang lain untuk turut serta menduduki kursi jabatan politik lainnya. Bahkan, masyarakat yang memiliki loyalitas terhadap figur politik yang telah terpilih dapat langsung menaruh *trust* kepada figur baru yang diperkenalkan oleh pejabat politik tersebut. Keterpilihan anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi masih sangat dipengaruhi oleh adanya peran keluarga sebagai elit lokal dalam proses pencalonan dan juga keterpilihan calon anggota legislatif perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan kekerabatan anggota legislatif terpilih perempuan di tingkat pusat dan provinsi di Provinsi Jambi dengan elit politik lokal.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik purposive sampling dimana diwawancarai para anggota legislatif perempuan terpilih dan juga tokoh-tokoh yang memahami pemilihan anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi tahun 2019. Selain itu penelitian ini juga akan menginterview calon anggota legislatif perempuan yang gagal terpilih namun aktif sebagai anggota suatu partai politik. Penelitian ini juga akan coba mengkombinasikan data-data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen partai dan juga situs-situs yang berkaitan. Metode ini penulis gunakan karena menganggap melalui metode ini fenomena dapat digambarkan dengan detail dan jelas mengenai politik kekerabatan keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Provinsi Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Elektoral Perempuan Jambi dalam Pemilu Legislatif 2019

Pemilihan dalam demokrasi merupakan kegiatan elektoral yang diikuti untuk memilih kepala pemerintahan dan juga wakilnya di parlemen yang diikuti oleh seluruh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan umum bukan suatu proses yang didominasi oleh satu kelompok saja tapi

juga merupakan kesempatan yang besar bagi siapapun untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalamnya. Kehadiran perempuan dalam dunia politik tidak terlepas dari hak politik yang juga dimiliki oleh perempuan dalam elektoral. Hak-hak perempuan dalam bidang politik terdapat dalam instrumen-instrumen internasional dimana hak-hak tersebut dalam bahasa umum, misalnya dalam Pasal 21 1 dan 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ICCPR, yang berbunyi:

Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk memegang jabatan di negaranya.

Tuntutan untuk memperhatikan keikutsertaan perempuan dalam politik di Indonesia semakin menjadi perhatian khusus terutama dengan berakhirnya masa orde baru. Salah satu aturan yang lahir pasca reformasi yang semakin memperhatikan keikutsertaan perempuan dalam politik adalah lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

dimana dijelaskan bahwa partai politik mempunyai kewajiban memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama saat Menyusun calon anggota legislative yang akan diusung dan dalam kepengurusan partai. Hal ini kemudian semakin dimapankan dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam UU tersebut kuota 30% keterwakilan calon anggota legislatif perempuan ini lebih dimapankan lagi dalam bentuk tindakan afirmatif (*affirmative action*) dan juga dalam bentuk Ziffer system.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik baik lokal maupun nasional di bidang legislatif. Sejak pemberlakuan aturan tersebut, jumlah perempuan Jambi yang terpilih hingga 30% sudah menunjukkan kehadirannya, meski jumlahnya belum mencapai 30%.

Provinsi Jambi mendapatkan jatah 8 kursi DPR yang terdiri dari satu Dapil. Dari 8 anggota DPR RI yang terpilih terdapat 1 anggota DPR RI perempuan

**Tabel III.**

**Data Anggota Perempuan di DPR RI Dapil Jambi**

No	Nama	Fraksi	Perolehan Suara
----	------	--------	-----------------

	Hj.	Partai	
1	Saniatul Lativa, M.M	Golongan Karya (Golkar)	87.911

*Sumber : Puskapol UI*

Berdasarkan tabel diatas dari 8 kursi anggota DPR RI yang tersedia terdapat 1 orang perempuan anggota DPR RI terpilih dari Provinsi Jambi yakni, Saniatul Lativa dari Partai Golkar. Dengan terpilihnya satu perempuan dari 8 kursi yang tersedia menunjukkan minimnya jumlah anggota DPR RI perempuan terpilih perwakilan Provinsi Jambi. Pada tingkat provinsi, kursi anggota DPRD Provinsi Jambi yang tersedia sebanyak 55 kursi. Dari 55 kursi yang tersedia terdapat 8 anggota DPRD Provinsi perempuan yang terpilih.

**Tabel IV:**

**Data Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019**

Periode	Lk	Pr	Jumlah
2004-2009	39	6	45
2009-2014	35	10	45
2014-2019	48	7	55
2019-2024	47	8	55

*Sumber : Puskapol UI*

Berdasarkan data tersebut, keterwakilan perempuan Jambi dalam Pemilihan Umum Legislatif tingkat DPRD Provinsi hanya sebesar 14,5% yang artinya bahkan setengah kuota 30% pun belum tercapai dimana hanya 8 anggota perempuan DPRD Provinsi yang terpilih dan 47 anggota

laki-laki DPRD Provinsi Jambi dari total 55 keterwakilan di tingkat legislatif Provinsi Jambi. Berikut uraian 8 anggota legislatif perempuan terpilih di tingkat DPRD Provinsi Jambi.

**Tabel V:**  
**Data Anggota Perempuan terpilih di DPRD Provinsi Jambi Periode 2019-2024**

No	Nama	Dapil	Fraksi	Perolehan Suara
1	Ririn Novianty, SE	Jambi II - Kab. Batanghari-Kab. Muaro Jambi	Partai Amanat Nasional (PAN)	8.274
2	Nur Tri Kadarini, SE., M.Si., Ak	Jambi II - Kab. Batanghari-Kab. Muaro Jambi	Fraksi PDI-P	6.711
3	Dra. HJ. Maimaznah	Jambi I - Kota Jambi	Fraksi Partai Golkar	4.245
4	HJ. Yuli Yulianti, S.E., M.M	Jambi I - Kota Jambi	Fraksi Partai Demokrat	10.048
5	Ezzaty, S.Psi	Jambi IV-Kab Kerinci -Kab Sungai Penuh	Fraksi Partai Demokrat	33.191
6	HJ. Nurhayati	Jambi VI-Kab Tanjung Bar-Tanjung Tim	Fraksi Partai Demokrat	4.350
7	HJ Eka Marlina, SE, MH	Jambi V-Kab Bungo-Kab Tebo	Fraksi partai PKB	15.866
8	HJ. Rahima, SH	Jambi V-Kab Bungo-Kab Tebo	Fraksi Nasdem Hanura	12.068

Sumber : DPRD Provinsi Jambi 2019 diolah

Hasil pemilu legislatif menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan menjadi legislator masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tindakan afirmatif berupa 30% keterwakilan perempuan, baik di DPRD maupun DPR RI belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan **Perempuan Dalam Arus Politik Lokal Jambi**

Representasi kaum perempuan dalam ranah politik lokal di Provinsi Jambi

tersebut. Dari data ini juga terlihat bahwa belum representatifnya keterwakilan kaum perempuan dalam Lembaga politik di Provinsi Jambi. kaum perempuan masih dianggap sebagai masyarakat dari golongan kelas dua di ranah politik lokal. Perempuan masih disubordinasikan, bahkan dianggap remeh oleh masyarakat yang masih menganut budaya patriarki. Argumentasi seperti ini menjadi salah satu faktor yang kemudian menghambat perempuan untuk dapat duduk dalam jabatan strategis di lembaga-lembaga politik yang dikarenakan perempuan kurang mendapatkan afirmasi pengakuan dalam ranah politik. Padahal, kebijakan hasil legislasi juga harus mempertimbangkan aspek kepentingan, aspirasi bahkan juga prioritas yang dapat diaspirasikan oleh kaum perempuan sehingga kebijakan-kebijakan tersebut tidak bias gender dan didominasi dari persepektif kaum laki-laki saja. Perbedaan perspektif, nilai, kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi kaum perempuan yang tentu berbeda dari kaum laki-laki sehingga diharapkan dapat memberikan perubahan mendasar kearah yang lebih demokratis.

dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya adalah ikatan kekeluargaan atau familial ties. Konsep familial ties merupakan konsep yang dikemukakan oleh

Linda K Richter (Richter, 1990) yang melakukan riset tentang kemunculan kaum perempuan dalam ranah politik di Asia Tenggara dan juga Asia Selatan pada tahun 1990an.

Dalam hasil risetnya Richter mengemukakan bahwa salah satu yang menjadi faktor kemunculan kaum perempuan dalam politik kepemimpinan di Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti Benazir Bhutto, Sheik Hasina Wajed Indira Gandhi, Sirimavo Bandaranaike, Corazon Aquino, Aung San Suu Kyi adalah "*familial ties*". *Familial ties* adalah saudara laki-laki baik dari ayah, ibu, mertua, kakak ataupun adik adalah seorang politisi yang memiliki pengaruh yang sangat kemudian memfasilitasi politisi dari kaum perempuan untuk membangun sampai mencapai dan memiliki peran dalam kepemimpinan politik (Richter, 1991: 156).

Penelitian-penelitian tentang politik gender *familial ties* disamakan dengan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini bila terus berlanjut dari generasi ke generasi maka akan membentuk dinasti politik yang diakibatkan oleh adanya sejarah kekerluargaan dari para pelaku politik.

Legislator perempuan yang terpilih, baik di ranah DPRD Provinsi Jambi maupun di DPR RI tidak terlepas dari adanya koneksi kekerabatan dengan politisi senior. Saniatul Lativa merupakan anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil Jambi yang menjabat sejak periode 2014-2019 dan 2019-2024. Saniatul Lativa merupakan istri dari Bupati Tebo dua periode 2011-2016 dan 2017-2022. Bukan hanya Legislator perempuan dari DPR RI terpilih saja yang memiliki hubungan kekerabatan tetapi juga di ranah DPRD Provinsi Jambi tidak terlepas dari adanya koneksi kekerabatan dengan politisi senior. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**Table VI. Data Anggota DPRD Perempuan terpilih Provinsi Jambi periode 2019-2024**

No	Nama	Dapil	Fraksi	Kekerabatan
1	Ririn Novianty, S.E	Jambi II	Partai Amanat Nasional (PAN)	Istri Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Wahyu Suseno
2	Hj. Yuli Yulianti, S.E., M.M.	Jambi I	Partai Demokrat	Istri Mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi Zainal Abidin Perode 2014-2019
3	Ezzaty, S.Psi	Jambi IV	Partai Demokrat	Anak Wali Kota Sungai Penuh
4	Hj. Nurhayati	Jambi VI	Partai Demokrat	Istri Mantan Asisten III Setda Provinsi Jambi
5	Hj. Eka Marlina, S.E., M.H	Jambi V	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Anak Mantan Bupati Kabupaten Tebo
6	Hj. Rohima, S.H	Jambi V	Partai Nasional Demokrat	Istri Gubernur Jambi Fachrori Umar Periode 2019-2021

Sumber: DPRD Provinsi Jambi 2019 di olah

Hasil pemilihan legislatif tahun 2019 dari 55 kursi DPRD Provinsi Jambi yang tersedia terdapat 8 anggota DPRD Provinsi perempuan terpilih. Dari 8 anggota DPRD Provinsi Jambi perempuan terpilih 6 orang diantaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan elit politik lokal. Adanya hubungan kekerabatan dengan elit politik lokal menjadi salah satu modal politik yang utama dan strategi dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019. Legislator terpilih yang memiliki kekerabatan politik dengan figur lokal, seperti pejabat lokal di dapil yang bersangkutan, istri pejabat lokal, anak pejabat lokal berimbas pada angka keterpilihan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan figur-figur lokal tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sehingga figur tersebut akan dengan mudah memperkenalkan kerabatnya yang lain untuk turut serta menduduki kursi jabatan politik lainnya. Bahkan, masyarakat yang memiliki loyalitas terhadap figur politik yang telah terpilih dapat langsung menaruh trust kepada figur baru yang diperkenalkan oleh pejabat politik tersebut.

Mark R. Thompson yang coba mengemukakan tentang sejarah politisi kaum perempuan terkemuka di Asia. Istilah yang digunakan adalah politik dinasti untuk menjelaskan bagaimana hubungan

kekerabatan antar politisi perempuan dengan politisi laki-laki, hasil risetnya menunjukkan hubungan kekerabatan sebagai ayah, suami merupakan factor kunci kaum perempuan dalam memperoleh kekuasaan. (Thompson, 2002: 45).

Politik dinasti sering juga disamakan dengan politik kekerabatan, walaupun sampai saat ini belum ada pengertian yang seragam. Menurut Ernesto Dal Bo mengemukakan politik dinasti dapat terlaksana dikarenakan politisi mempunyai hubungan kekerabatan dengan politisi sebelumnya (Dal Bó et al., 2009).

Definisi yang disampaikan oleh Dal Bo di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Pablo Querobin (2011: 11) yang mengemukakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara memonopoli kekuasaan politik.

Sedangkan menurut Yasushi Asako (2012: 22) menyatakan bahwa politik dinasti terlaksanan dikarenakan suatu anggota keluarga mendapatkan kekuasaan yang sebelumnya diduduki oleh kerabatnya (Asako et al., 2014). Sementara itu Menurut Stephen Hess (Kurtz, 1989: 20). Politik dinasti apabila terdapat 4 atau lebih anggota

keluarga yang memiliki hubungan darah menduduki jabatan politik.

Eksistensi perempuan dalam ranah politik lokal memang belum sepenuhnya terpenuhi dan budaya patriarki menjadi salah satu faktor yang menghambat kehadiran perempuan di ranah politik lokal. Namun, dengan memanfaatkan politik kekerabatan, perempuan memiliki modal yang kuat untuk dapat dipilih oleh masyarakat yang masih sangat kental dengan budaya patriarki ini. Politik kekerabatan menjadi modal utama kaum perempuan agar bisa terpilih di ranah politik bahkan menjadi fast track (jalur cepat) bagi kaum perempuan untuk dapat berkontestasi dalam elektoral. Selain modal politik berupa politik kekerabatan yang dimiliki oleh caleg perempuan, kebijakan afirmatif dengan kuota 30% perempuan yang harus berada dalam partai politik, membuat partai politik harus mengkader perempuan untuk dapat dikandidasikan dalam pemilihan legislatif. Kandidasi ini diawali dari proses rekrutmen, dan salah satu proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah dengan mengkader orang-orang yang berasal dari keluarga politisi atau pejabat politik yang terdahulu terpilih. Hal ini dikarenakan akan cukup berbahaya jika partai politik tidak melakukan kaderisasi terlebih dahulu

dan langsung berkontestasi dalam pemilu karena ditakutkan caleg dari kerabat politik ini tidak memiliki kompetensi di bidang politik.

Politik kekerabatan atau *Familial ties* dalam politik terjadi dikarenakan adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dalam 2 generasi dalam jabatan politik (Kimberly Lynn Casey, 2009: 24). Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam mengisi jabatan-jabatan politik dilakukan berdasarkan dan mempertimbangkan suatu hubungan kekeluargaan bukan berdasarkan aspek kualifikasi dan kualitas seorang kandidat.

Penelitian ini menggunakan istilah *familial ties*, bukan politik kekerabatan maupun politik dinasti dimana pada politik kekerabatan seolah kandidat yang terpilih tidak memiliki kualifikasi sedangkan alasan untuk tidak memilih konsep politik dinasti adalah untuk meminimalisir distorsi dinasti yang sering dimaknai dengan sistem kerajaan. Adanya politik kekerabatan dalam kekuasaan politik yang dimiliki oleh kaum perempuan menunjukkan bahwa sebenarnya secara kualifikasi perempuan terpilih memiliki kualifikasi yang memadai hanya saja mengandalkan ikatan keluarganya untuk

mempromosikan dirinya agar dapat terpilih dalam pemilihan legislatif. Hal ini dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat sehingga perempuan perlu mendapatkan afirmasi pengakuan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk dapat duduk di kursi parlemen. Afirmasi inilah melalui keterikatannya dengan kerabat politik yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat sehingga hal tersebut menjadi modal politik utama yang dimiliki oleh legislator perempuan terpilih untuk mendapatkan kursi parlemen, baik di tingkat DPRD Provinsi maupun di DPR RI.

### SIMPULAN

Hasil Pemilihan Legislatif tahun 2019 dari 8 kursi anggota DPR RI Provinsi Jambi yang tersedia terdapat 1 orang perempuan anggota DPR RI yakni, Saniatul Lativa dari Partai Golkar. Saniatul Lativa merupakan istri dari Bupati Tebo dua periode 2011-2016 dan 2017-2022. Sementara itu pada tingkat provinsi, kursi anggota DPRD Provinsi Jambi yang tersedia sebanyak 55 kursi, dari 55 kursi yang tersedia terdapat 8 anggota DPRD Provinsi perempuan yang terpilih. Dari 8 anggota DPRD Provinsi Jambi perempuan terpilih 6 orang diantaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan elit politik lokal. Adanya hubungan kekerabatan dengan elit politik lokal

menjadi salah satu modal politik yang utama dan strategi dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019. Legislator terpilih yang memiliki kekerabatan politik dengan figur lokal, seperti pejabat lokal di dapil yang bersangkutan, istri pejabat lokal, anak pejabat lokal berimbas pada angka keterpilihan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan figur-figur lokal tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sehingga figur tersebut akan dengan mudah memperkenalkan kerabatnya yang lain untuk turut serta menduduki kursi jabatan politik lainnya. Bahkan, masyarakat yang memiliki loyalitas terhadap figur politik yang telah terpilih dapat langsung menaruh trust kepada figur baru yang diperkenalkan oleh pejabat politik tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ani Soetjipto, (2011). *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta.
- Anifatul Kiftiyah . (2019). *Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia . Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia*
- Asako, Yasushi. et.al. (2012). *Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan*, Waseda University Organization for Japan-US Studies. Working Paper No. 201201.

- Casey, Kimberly Lynn. (2009). "Family Matters: The Prevalence and Effects of Political Families in National Politics." Ph.D diss. University of Missouri.
- Dirga Ardiansa, (2016) "Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia". *Jurnal Politik Universitas Indonesia*, 2 (1).
- DPRD Provinsi Jambi. Anggota DPRD Provinsi Jambi. <https://dprd-jambiprov.go.id/dewan>
- Dal Bo, E., Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder. 2006. "Political Dynasties", Diunduh dari [SSRN: http://ssrn.com/abstract=909251](http://ssrn.com/abstract=909251).
- Kurtz II, Donn M. (1989). "The Political Family: A Contemporary View." *Sociological Perspectives* 32 (Autumn), No. 3: 331-352.
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). "Daftar Pemilih Tetap (DPT)". <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/dpt/>.
- Linda K Richter (1990-1991) "Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast Asia," *Pacific Affairs*, Vol.63, No. 4.
- Mark. R. Thompson, (2022-2003) "Female Leadership of Democratic Transition in Asia," *Pacific Affairs*, Vol. 75, No. 4.
- Nimrah, S., & Sakaria (2014). "Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif". *Jurnal The Politics*, 1(2), 2014, hal. 173-182.
- Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekkerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(2), 167-178.
- Puskapol UI DPRD Provinsi Jambi 2019 <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019>
- Querubin, Pablo. (2011). *Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines*, paper dipresentasikan pada APSA Annual Meeting.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39-62.
- Richter. Linda K. 1992. "Political Instability and Tourism In The Third World" in *Tourism & The Less Developed Countries*, Edited by David Harrison. London: Belhaven Press.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39-62.

Submission: 06 Mei 2023

Publication: 25 Juni 2023

ISSN: 2614-4336

VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357

Subekti, V.S. (2008). “Kepemimpinan Politik di Indonesia”. *Jurnal Politika*, 4(1), hlm. 12-37.

Soetjipto, Ani dan Pande. (2013). *Gender dan Hubungan Internasional*. Jakarta : Jalasutras

Wring, D. (1996). *Political marketing and party development in Britain*: A

“secret” history. *European Journal of Marketing*, 92-103.

#### PROFIL SINGKAT

**Nama Alva Beriansyah, S.IP., M.IP.** Lahir di Palembang, 12-10-1990. Penulis merupakan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi sejak tahun 2019. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan.